

**BAB IV**

**STRATEGI TURKI DALAM MENGHADAPI MILITAN KURDI DI  
PERANG SURIAH**

**A. *Free Syrian Army* Sebagai Aliansi Turki Dalam Perang Melawan  
Kurdistan Suriah**

Peristiwa pembebasan kota Kobani membuat Federasi Suriah Utara menjadi terangkat pamornya hingga menarik bantuan AS, Rusia bahkan Eropa seperti yang telah dijelaskan di bab 3, tentu membuat Turki menjadi waspada dan kecewa. Presiden Erdogan mengecam bantuan AS terhadap teroris YPG dan menganggap akan menciptakan sebuah “Lautan Darah” baru (BBC News, 2016). Maj Yasser Abdul Rahim, komandan tempur FSA juga merasa bantuan tersebut menjadi indikator bahwa aliansi barat sudah meninggalkan mereka.

Turki hanya saat tersebut hanya mampu menaruhkan harapan kepada FSA, yang dianggap loyal sejak dan bantuan humaniter kepada tentara Suriah yang membelot, koalisi *Friend of Syria*, hingga pelatihan militer secara diam diam kepada FSA itu sendiri yang sebelumnya ditulis pada bab 2. Pemerintahan Sementara Suriah juga tidak mengakui pemerintahan lain didalam Suriah (Loutfi, 2017, hal. 18), ditambah Pada saat FSA membentuk diri, Kolonel Riad-al-Assad petinggi FSA juga pernah melontarkan perkataan “ Kami tidak menginginkan adanya agenda dari faksi pasukan Kurdi manapun dan kita tidak akan pergi dari

(kota) Qamshili hingga kita benar-benar berjuang bersama” (Middle East Report N°136 , 2013, hal. 34).

Namun pada tahun 2015 justru Salih Muslim, pemimpin PYD mulai menawarkan pemerintah untuk bergabung namun dengan syarat membentuk sistem konfederalis disaat kedua faksi tersebut sedang menggempur ISIS di kota Hasakah (Al Jazeera, 2015). Ini membuat kelompok oposisi akhirnya ragu terhadap sikap politik PYD tersebut yang malah mendekati pemerintah.

YPG pun menjadi ancaman loyalitas militan-militan FSA. Karena pada saat Kobani digempur, militan oposisi yang berada di bawah payung FSA pernah terlibat dengan YPG dalam sebuah operasi militer gabungan bernama “Eufrat Volcano”, militan-militan FSA yang tergabung dalam operasi gabungan tersebut antara lain: al-Tawhid Brigade, Raqqa Rebels Brigade, the North Sun battalion, Jarablus Brigade, al-Akrad Front, Raqqa Guardians Rebels group dan al-Qassas Army (ARANews, 2014). Disaat YPG membentuk payung militan SDF, Jabhat Thuwar A-Raqqa dan Liwa Thuwwar Raqqa yang berasal dari FSA pada tahun 2015 juga sempat berkeinginan bergabung di dibawah komando SDF (Zeid, Hamou, & Kieke, 2015).

Namun hal tersebut tidak serta merta membuat Turki berpaling dari FSA. Setidaknya masih ada beberapa militan FSA yang loyal, seperti pada saat Turki pernah melancarkan operasi penyelamatan atau pemindahan makam Sulaiman Syah yang terletak di wilayah Suriah, karena mendapatkan ancaman penghancuran dari ISIS (The Irish Times, 2015). Zekeriye Karşlı komandan FSA

berjanji akan mempertahankan makam tersebut jika dipindahkan di kota Qara Rozaq, didekat kota Manbij, bahkan dengan nyawa mereka sendiri ('We will protect Suleyman Shah's tomb if it's moved to Qara Qozak,' says FSA commander, 2018), karena makam yang dianggap aset bersejarah bagi Turki tersebut tidak dipindah ke wilayah Turki, melainkan di tetap berada di wilayah Suriah dekat perbatasan yang dikuasai oleh FSA, dan menurut PM Fikri Işık akan dikembalikan ke wilayah semula (Süleyman Shah's tomb will return to original location as 'Turkish land,' Deputy PM says, 2018).

Turki yang pada akhirnya melibatkan diri untuk pertama kali di perang Suriah, dalam Operasi Benteng Eufkrat juga melibatkan 10.000 hingga 12.000 pasukan FSA yang bermarkas di Turki dan terbagi atas 6 unit faksi militan (What we know about 'army unit' Turkey is setting up in northern Syria?, 2017). FSA memandang aliansi ini sebagai kesempatan untuk membasmi ISIS karena selama ini kekuatan global dianggap sudah lupa (Fall of Aleppo could tip Syria from civil war to insurgency, 2016). Walau pada akhirnya aliansi tersebut menarik militan beretnis Turkmen dan pada membuat sebuah unit komando yang terdiri dari etnis Arab dan Turkmen, dengan nama Tentara Nasional Suriah (الجيش الوطني السوري, *al-Jayş al-Watanī as-Sūrī*) namun media lebih banyak menamai "Pemberontak yang didukung Turki" (*Turkish Backed Rebel*, atau disingkat TFSA).

TFSA sendiri terdiri dari 10.000 pasukan dari 36 militan FSA yang dibagi atas tiga legiun dan di perintah atas satu komando dan tetap menjadi bagian FSA. Pembentukan TFSA diumumkan pada akhir Desember 2017 oleh Perdana Menteri pemerintahan SIG, Jawad Abu Hatab (Zaman Al Wasl, 2017) dan isyarat Presiden

Erdogan yang memberikan isyarat membuat formasi baru di Suriah (TAŞKÖMÜR, 2018) dan persiapan selama empat bulan oleh kementerian pertahanan pemerintahan sementara Suriah (SIG). Pemerintahan SIG juga membuat Polisi Pembebasan Suriah (*Free Syrian Police*) bulan Januari, 2019, yang sebelumnya telah dilatih selama lima minggu di kota Mersin, Turki (*Free Syria Police: Creating Security and Stability in North Aleppo*, 2018).

Formasi kelompok-kelompok itu menjadi sebuah tanggung jawab Turki setelah menguasai kota Jarablus dalam operasi Benteng Eufrat dan menjadi strategi sampingan dalam intervensi Turki di Suriah. Selain menciptakan stabilitas kota dan menciptakan sistem administrasi pemerintahan pemberontak yang kuat, maupun ataupun pemberian bantuan-bantuan kemanusiaan. Ini juga menjadi implementasi proyek Turki dalam menciptakan *Save Zone* di Suriah sekaligus menjadi model pembangunan kota-kota lain yang dikuasai oleh oposisi (Haid, 2017, hal. 8).

Strategi Turki sebenarnya tetaplah melakukan ekspedisi militer ke wilayah Suriah dengan mengupayakan pengusiran pasukan YPG. Setelah TFSA yang terbentuk pada saat operasi benteng eufrat berlangsung, pada tahun 2018 awal, Turki kembali melancarkan operasi *banteng zaitun* yang hanya benar-benar ditunjukkan untuk melawan pemerintahan DFNS dan militan YPG di kanton Afrin, dengan melibatkan pasukan TFSA sebanyak 25.000 pasukan (Al-Khalidi, 2018).

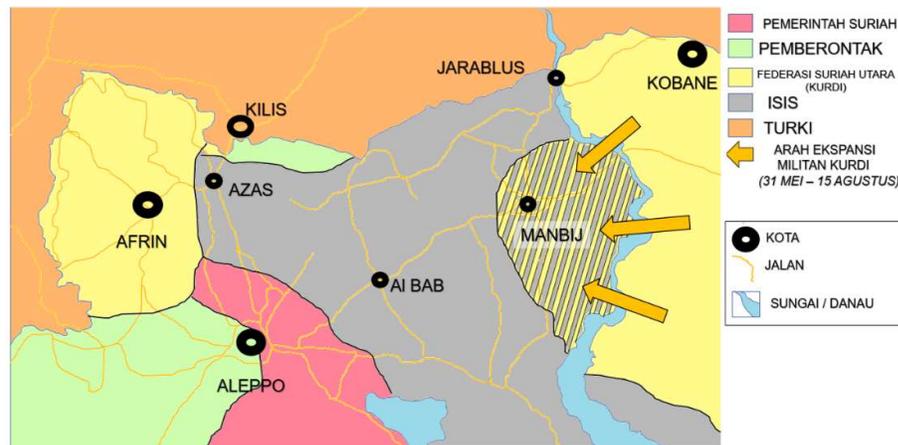
## **B. Ekspedisi Militer Turki Di Suriah**

### **1. Operasi Pelindungan Eufrat (*Euphrate Shield Operation*)**

Turki untuk pertama kalinya melakukan ekspedisi militer di barat sungai Eufrat dalam kode operasi “Perlindungan Eufrat” pada tanggal 26 Agustus 2016. Penamaan tersebut dipilih atas operasi tersebut yang dilaksanakan di barat sungai Eufrat tepatnya di target kota Jarablus dan Manbij yang masuk dalam wilayah ke gubernuran Aleppo. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa posisi tersebut diambil Turki. Pertama kedua kota tersebut merupakan jalan masuk bagi Turki ke kota Aleppo yang dianggap kota strategis selama perang sipil berlangsung (BBC News, 2016).

Kedua, ISIS selama ini mengontrol perbatasan di sepanjang 100 Km, dari kota Azaz hingga ke Jarablus yang berada di barat sungai Eufrat atau utara Manbij. Selama ini ISIS telah menargetkan kota diperbatasan Turki yang menjadi wilayah strategis bagi pertahanan, kota Kilis salah satunya (YEŞILTAŞ, SEREN, & ÖZÇELİK, 2017, hal. 13). ISIS juga menjadikan sungai Eufrat sebagai jalur masuk dan keluar suplai persenjataan maupun militan dan simpatisan. Terakhir, pasukan SDF mulai menyeberang ke sungai Eufrat dan menyerang kota Manbij yang berada dalam jerat ISIS yang dimulai 31 Mei 2016, dan berakhir 12 Agustus 2016 (BBC, 2016). Jika SDF berhasil menguasai wilayah Manbij ada kemungkinan ekspansinya akan mengarah ke kota kota lain seperti Jarablus

hingga ke arah Afrin yang menjadi wilayah kantong DFNS, dan akan membentuk “Koridor Kurdi” (Murat, 2016) Jika SDF berhasil mengekspansi ke arah barat lebih jauh, NSR akan lebih banyak mendapatkan perhatian dari negara lain,



terlebih SDF juga sedang gencar melakukan serangan menuju kota Raqqa yang menjadi ibukota bagi ISIS.

(Gambar 4.2.1.1 Peta Konflik Suriah Wilayah Utara Bulan Agustus, 2016.)

Serangan bom di kota Gaziantep pada tanggal 20 yang menewaskan 50 korban sipil mengguncang publik Turki dan membuat urgensi untuk melintasi perbatasan (*cross border*) Suriah meningkat. Padahal beberapa saat sebelumnya PM Binali Yildirim memutuskan peran aktif Turki di Suriah dalam enam bulan kedepan (News, BBC, 2016). Turki mengelak bahwa masuknya Turki ke Suriah

merupakan keputusan yang legal dengan menyinggung Resolusi DK PBB No. 2249 sebagai “Hak Atas Membela Diri” (*Right to Self-Defence*) yang diadopsi November tahun lalu (TRT World, 2016).

AS rekan terkuat Turki dalam perang Suriah, juga menyetujui keputusan Turki tersebut. Hal itu langsung di umumkan oleh wakil presiden, Joe Biden kala itu yang meminta pasukan Kurdi untuk menghentikan rencana penyatuan Afrin dengan wilayah Timur lainnya (DeYoung, 2019). Ucapan Biden tersebut juga sebagai dianggap sebagai penyambung hubungan Turki-AS yang baru memanas setelah terjadi kudeta tanggal 15 lalu.

Begitupula dengan Rusia yang juga mulai membuka hubungan dengan Turki setelah dilanda krisis selama 9 bulan atas penembakan pesawat jet Rusia di dekat perbatasan Turki-Suriah. Sama seperti AS, Turki juga memanfaatkan momentum dukungan kepada Erdogan setelah terjadinya peristiwa kudeta sebulan sebelumnya (Walker S. , 2016). Dua faksi besar AS-Rusia dalam perang Suriah ataupun peristiwa kudeta, ditambah pemimpin dunia yang bersimpati merespon serangan bom tersebut juga sekaligus menjadi isyarat lampu hijau bagi Turki untuk menyerang ISIS dan PYD di Suriah (Anadolu Agency, 2016).

Erdogan menyalahkan ISIS dalam serangan bom pesta pernikahan di Gaziantep (Letsch, 2016) dan tiga hari setelahnya angkatan darat Turki menembakan artileri ke arah kota Jarablus di titik strategis ISIS sebanyak 60 kali (Sky News, 2016). Pada 24 Agustus pagi, angkatan darat membombardir kembali kota Jarablus dibantu dengan serangan udara, beserta konvoi kendaraan berat yang

dikawal pasukan pemberontak melewati perbatasan. Divisi pasukan khusus dari Angkatan darat Turki (*Türk Silahlı Kuvvetleri*, TSK) di bawah komando Letjen Zekai Aksakallı, memegang tanggung jawab penuh dalam mengkoordinir eksekusi lapangan, dengan mengirimkan sekitar 4.000 pasukan. Sedangkan dari pasukan pembebasan ada sekitar 7.000 pasukan militan yang membantu (*Opcit*, YEŞILTAŞ, SEREN, & ÖZÇELİK, 2017, hal. 22).

Dalam pidatonya Erdogan mengumumkan operasi melawan ISIS dan PYD dimulai pukul 04.00 waktu setempat (IS conflict: Turkey-backed Syrian rebels take Jarablus, 2016). Penguasaan Jarablus tidak berlangsung lama hanya dalam sehari pasukan pembebasan dan angkatan darat Turki berhasil menguasai seisi kota. Menurut laporan dari *SETA Foundation* (*Ibid*, YEŞILTAŞ, SEREN, & ÖZÇELİK, 2017). Masa eksekusi dalam operasi yang berlangsung sekitar 7 bulan, terbagi atas 4 fase pertempuran ISIS, sedangkan pertempuran dengan militan kurdi berada di pertengahan dan akhir dari fase tersebut.

Fase pertama adalah penguasaan Eufrat barat hingga pinggiran sungai Sajur yang merupakan anak sugai Eufrat dari tanggal 24 hingga 28 Agustus termasuk kota Jarablus didalamnya. Angkatan Darat Turki tidak melebarkan wilayahnya ke timur eufrat melainkan mengarah ke tepi utara sungai Sajur karena sebelumnya Turki mendesak AS untuk memnundurkan pasukan Kurdi di timur dan di kota Manbij. Pasukan kurdi yang diberada di utara sungai Sajur, juga dipaksa mundur setelah berusaha mengambil menguasai kota Amarinah yang berada di utara sungai Sajur sebagai respon menolak seruan Bidden untuk mundur (Al Masdar News, 2016).

Pada tanggal 28 Agustus hingga 3 September Turki dan pasukan pemberontak menggunakan taktik bertahan dengan bersenjatakan senjata anti tank dan unit militer yang sedikit untuk mempersiapkan taktik selanjutnya ke arah kota al-Rai di barat, serta memberikan bantuan ke penduduk lokal. Pada fase kedua yang dimulai dari tanggal 3 September hingga 16 Oktober, angkatan darat Turki dan pasukan pembebasan melakukan serangan ke arah wilayah pertahanan ISIS di kota al-Rai hingga Dabiq di barat sungai Sajur, yang dianggap lebih kuat dari Jarablus. Karena baik ISIS maupun pasukan Kurdi memiliki kapasitas persenjataan yang memadai.

Penyerangan dalam fase ke dua dimulai dengan menembakan artileri udara Turki, sedangkan pasukan pemberontak mengepung dari utara kota al Rai dengan menerobos perbatasan. Pada garis jalur al-Ray-Dabiq, militan ISIS memiliki basis basis terkuat di wilayah pedesaan, terutama kota Dabiq yang menjadi *check point* pertama simpatisan ISIS yang baru menyeberang dari Turki. Akhirnya hal tersebut mendesak angkatan darat Turki menambahkan kendaraan lapis baja di kota al- Rai hingga Dabiq, untuk menumpas 20-25 militan ISIS di masing masing desa dengan peralatan tempur yang memadai.

Dalam fase kedua ini, wilayah Turki dan pasukan pembebasan mampu menjangkau kota Azaz hingga Mare seluas 1.300 KM persegi dan membuat Dabiq menjadi terkepung. Situasi tersebut membuat ISIS meluncurkan roket kendali jauh ke Kilis yang berada di Turki, Azaz, Mari'a dan al-Rai. Dalam operasi pengepungan Dabiq, strategi teroris semakin sulit dan intens akhirnya membuat Turki dan pasukan pembebasan memilih kota Akhtarın yang berada di tenggara

Dabiq yang membuat pengepungan semakin sempurna. Pada 16 Oktober, kota Dabiq berhasil dibebaskan.

Masuk fase ketiga, pertempuran juga semakin rumit karena pasukan Kurdi dan pesawat Assad berusaha merebut kota Mari'a untuk membuat jalur koneksi ke al-Bab, yang menjadi penghubung antara Manbij dengan Afrin. Melihat hal ini, angkatan udara Turki melakukan bombardir ke desa Maarat Umm Hawsh pada tanggal 20 Oktober yang membunuh sekitar dua ratus pasukan Kurdi dan militan ISIS yang tersisa.

Melihat kemungkinan-kemungkinan tersebut, Turki memilih jalur Dabiq-al-Bab sebelum benar-benar melancarkan operasi di al-Bab. Taktik pengepungan ISIS juga mengancam kota Tal Rifa'at yang wilayah strategis pasukan Kurdi di utara Aleppo karena posisi kota Mari'a yang sangat berdekatan. Akhirnya membuat pasukan SDF bergerak maju ke timur menguasai sebuah desa yang dikuasai oleh pasukan pemberontak dan menyita tiga tank milik Turki (Kurdish forces capture village in northern Aleppo as the Turkish Army redeploys, 2016).

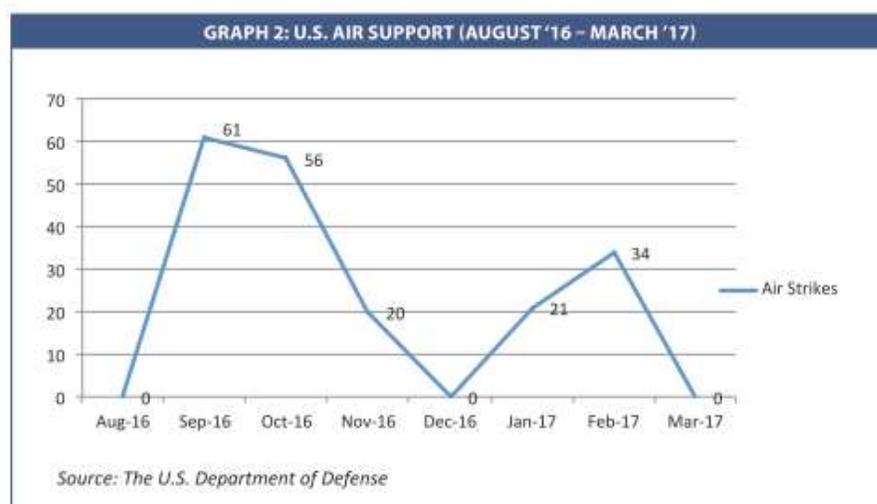
Pasukan AD Turki dibantu skuadron tempur udara merespon penyerangan pasukan SDF dengan memblokade lewar serangan udara ke barat dan menewaskan setidaknya 15 pasukan kurdi. Penyerangan oleh SDF ini juga sempat membuat hubungan Turki dan AS menegang, namun tidak menghentikan agresi lanjutan ke arah utara kota al-Bab. Dalam fase ketiga, satgas pasukan elit AD Turki memimpin kendali lebih banyak dan berusaha membuat markas komando di wilayah strategis aman, walaupun juga mendapat serangan 40-60 kali oleh militan

ISIS lewat serangan bom bunuh diri dan bom mobil. Tak berhenti disitu, pasukan pemerintah Suriah melalui jet udaranya juga beberapa kali menjatuhkan artileri kearah jalur yang hendak di kuasai Turki dan pasukan pembebasan dari ISIS tersebut.

Fase ketiga berakhir dengan perolehan wilayah di pedesaan sekitar 2-3 km dari kota al-Bab pada tanggal 20 Desember. Fase final, atau lebih dikenal sebagai pertempuran al-Bab dilaksanakan sehari setelahnya, walaupun beberapa media menyebutkan bulan November merupakan tanggal dimulainya. Kota al-Bab menjadi medan paling berat setelah Dabiq. Dalam tahap pertama pasukan darat dan udara Turki menyerang secara mendadak dengan menysasar 67 target dan sebuah rumah sakit yang menjadi markas besar ISIS di al-Bab, dengan melibatkan sekitar 150 batalion satgas (Daily Sabah, 2016).

Jaringan media *Rudaw* lewat *Twitter* menyebutkan ada sekitar 500 personel yang dikerahkan (Rudaw English, 2016), dan ada sekitar 3.000 dari pasukan pembebasan. Sedangkan untuk korban yang berjatuhan ada sekitar 400 prajurit dari pihak pasukan pembebasan maupun angkatan darat Turki itu Sendiri, dan menurut badan pengawas HAM Suriah (SOHR) mengatakan ada 444 sipil yang tewas dalam pertempuran 96 diantaranya adalah anak anak (Loveluck & Sly, 2017).

Bagi Turki, menguasai al-Bab membutuhkan waktu yang lama, David Pollack dari Washington Insitute kepada *Rudaw* mengatakan Turki yang baru saja membuka hubungan baik dengan Rusia, banyak melakukan perhitungan dan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama setelah Damaskus mengancam akan menjatuhkan pesawat tempur Turki (Iddon, 2017).Ancaman tersebut membuat Turki tidak mampu mengandalkan serangan udara, dan dan alhasil hanya bertumpu harapan kepada angkatan udara AS.



(Tabel 4.2.1.2, Grafik Jumlah Serangan Udara AS Selama Operasi

Perisai Eufrat Berlangsung. Peningkatan terjadi penyerangan

Jarablus dan Al-Bab, setelah adanya ancaman dari pasukan Bashar al Assad untuk menembak jatuh pesawat tempur milik Turki. Sumber: (*Ibid*, YEŞILTAŞ, SEREN, &

ÖZÇELİK, 2017, hal. 30))

Situasi politik di akhir penyerangan al-Bab juga semakin rumit setelah pasukan AS, melalui media *Twitter* Sentral Komando AS (CENTCOM) menyatakan dukungan terhadap dewan militer Manbij yang merupakan bagian dari SDF (Antonopoulos, 2017). Turki menggertak sekali lagi dan secara cepat pasukan pembebasan melakukan konvoi militer dan menyerang beberapa desa di pinggir barat kota Manbij (Middle East Eye, 2017). Melalui sebuah pidato, Erdogan berencana menjadikan Manbij menjadi target selanjutnya dan berhenti menarget kota Raqqa yang sebenarnya telah direncanakan sebagai akhir dari operasi Turki di Suriah (Reuters, 2017).

Rencana penyerangan Raqqa menjadi rencana Turki terkuat setelah berani membobol perbatasan. Menurut analisis strategi dan koresponden BBC, Jonathan Marcus, keterlibatan Turki dalam operasi telah menjadikannya sebagai peranan terpenting koalisi AS dan Erdogan berharap mampu menjadi sebagai aktor strategis dalam peranan utama (*Role Play*) di perang Suriah (BBC News, 2016). Namun bantuan AS terhadap pasukan kurdi justru menjadi kesalah pahaman dan justru membuat hubungan Turki-AS kembali menegang.

Situasi yang rumit akhirnya membuat AS meyakinkan Turki bahwa bantuan AS terhadap dewan militer Manbij bersifat temporer dan tidak pasti (Babb, 2017). Kapten AL AS, Davis Jeff kepada VOA untuk tetap fokus terhadap al-Bab dan penempatan militer AS diantara al-Bab dan Manbij sebagai bagian dari misi AS untuk menjamin agar pasukan Turki tidak menyerang pasukan Kurdi di Manbij, ataupun pasukan Kurdi untuk menyerang pasukan Turki ke al-Bab

Situasi internasional yang tidak memungkinkan lainnya juga datang dari Rusia yang juga tidak mendukung keputusan Turki untuk menyerang Manbij. Keterlibatan Rusia hadir semenjak pasukan pemerintah Suriah dan pasukan pembebasan yang sempat pecah dan menyebabkan 22 pasukan pemerintah Suriah tewas (Middle East Eye, 2017).

Rusia melalui konferensi press staff umum departemen operasi Rusia, Sergey Rudskoy berunding dengan PYD dan AS hingga memutuskan mengambil alih sebagian wilayah yang dikuasai oleh pasukan Kurdi kepada pasukan pemerintah Suriah (Sabah, Russia confirms regime takeover in Syria's YPG-held Manbij, 2017). Keputusan tersebut juga telah dirundingkan sebelumnya dalam pertemuan di Antalya pada 7 Maret 2017 antara kepala Staf Umum Turki, Hulusi Akar, Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Joseph Dunford, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Rusia, Valery Gerasimov yang membahas koordinasi keamanan regional Suriah Irak dari teroris ISIS dan mitigasi perpecahan antara pihak pihak tersebut. (Radio Free Europe, Radio Liberty, 2017).

Namun kesepakatan itu tidak membuat Turki puas, pada kenyataannya menteri pertahanan Turki, Fikri Isik saat di wawancari *Reuters* pada tanggal 16 Maret, justru mengkritik kesepakatan AS dan Rusia yang menahan Turki untuk melancarkan serangan ke Manbij dan membirakan pasukan Kurdi berada di barat Eufrat (Reuters, 2017). Keputusan terburu buru Erdogan dan penahanan Turki untuk menyerang Manbij oleh Rusia dan AS juga menjadi akhir operasi perisai Eufrat di akhir Maret dan memulangkan sekita 26.000 pengungsi Suriah dan

menyerahkan wilayah sepanjang 2000 mil persegi ke tangan para pemberontak Suriah.

Pertempuran Turki dengan pasukan Kurdi memang sedikit namun signifikansinya begitu besar dari awal operasi hingga akhir. Salah satunya adalah membuat negara-negara Eropa seperti Perancis (Hurriyet Daily News, 2016) dan Jerman (Adel, 2016) mengkritik dan meragukan operasi Turki melawan ISIS disaat pasukan kurdi sedang sengit bertempur merebutkan kota Raqqa yang menjadi basis pertahanan ISIS di Suriah.

Pengumuman akhir operasi secara resmi disampaikan oleh perdana menteri Binali Yildirim mengatakan dalam pidatonya bahwa operasi telah berakhir secara prematur dan tidak pada waktunya (BBC News, 2017). Ia juga menambahkan bahwa Turki akan melancarkan operasi baru dengan nama yang berbeda dengan tujuan yang berbeda.

## **2. Operasi Ranting Zaitun (*Olive Branch Operation*)**

Pasukan Kurdi baik SDF ataupun YPG, pertempuran melawan ISIS masih menjadi prioritas dan tidak begitu melirik operasi perisai eufrat sebagai hal krusial yang utama dan sebelumnya, telah meminta jaminan kepada siapapun untuk menahan pasukan Turki di Timur Eufrat (France 24, 2016). Pada bulan Oktober, pasukan SDF berhasil menguasai Raqqa secara keseluruhan menyelip pemerintah Suriah, pemberontak, bahkan Turki yang telah lama memiliki wacana menyerang jantung kota ISIS di Suriah (Reuters, 2017).

Masalah lain Turki, datang dari aliansi terkuat dari kubu Kurdi satu satunya, pemerintahan regional Kurdistan Irak atau KRG (*Kurdistan Regional Government*) yang sedang mempersiapkan jejak pendapat referendum memisahkan diri dari Irak pada bulan September. Keputusan tersebut membuat hubungan Turki dan KRG bersitegang (Hurriyet Daily News, 2017). Referendum kemerdekaan tersebut justru memunculkan distabilitas nasional Irak ataupun menjadi sumbu aspirasi gerakan gerakan Kurdi lainnya di timur tengah untuk memilih referendum terutama gerakan PKK di Turki secara tidak langsung. Padahal KRG sejauh ini mempunyai posisi yang strategis bagi Turki sebagai aliansi Kurdi terbesar yang juga menentang kehadiran pasukan YPG bahkan PKK di Suriah.

Untuk mengantisipasi hal itu Erdogan menginisiasi pertemuan antara staff jendral Turki, Hulusi Akar, dengan jendral militan Iran, Mohammad Hossein Bagheri, di Ankara untuk membahas keamanan regional di negara sekitar Irak terkait referendum yang diselenggarakan KRG (Rudaw, 2017) di Ankara pada bulan Agustus. Menlu Turki, Mevlut Cavusoglu juga menambahkan dalam keterangan press, keputusan KRG untuk melakukan referendum akan mengganggu stabilitas nasional Irak dan berimbas kepada wilayah kawasan, Turki dan Iran.

Pertemuan antara Turki dan Iran juga terbilang langka tersebut juga berimbas pada kebijakan Turki di Suriah. Sebulan sebelumnya, kedua negara yang juga terlibat dalam konflik Suriah tersebut mengadakan pertemuan di Astana, Khazakstan untuk membahas pembicaraan damai (*Peace Talk*) di Suriah bersama

dengan Rusia. Rusia dan Turki yang baru saja berdamai, menjadi aktor representatif penting bagi negara proksi pendukung pemberontak dan pemerintah Suriah.

Representasi Turki sebagai satu satunya penjamin kubu pemberontak dalam perundingan Astana juga semakin kuat, karena partisipasi AS dan sekutu barat hanya sebagai observer. Turki kerap menolak proposal resolusi konflik, salah satunya menolak usulan AS untuk mengikutsertakan PYD dalam perundingan dan membawa Dewan Nasional Kurdi yang berada dikubu pemerintahan pemberontak ke meja perundingan (Kurdistan 24, 2017).

PBB yang berada diposisi yang juga sama, kerap kali mengkritik dan mengajak untuk meninggalkan perundingan Astana karena tidak peluang peluang dalam dalam konflik (Radio Free Europe, Radio Liberty, 2018). Setidaknya perundingan Astana menjadi rival bagi perundingan damai Geneva yang sebelumnya telah digelar.

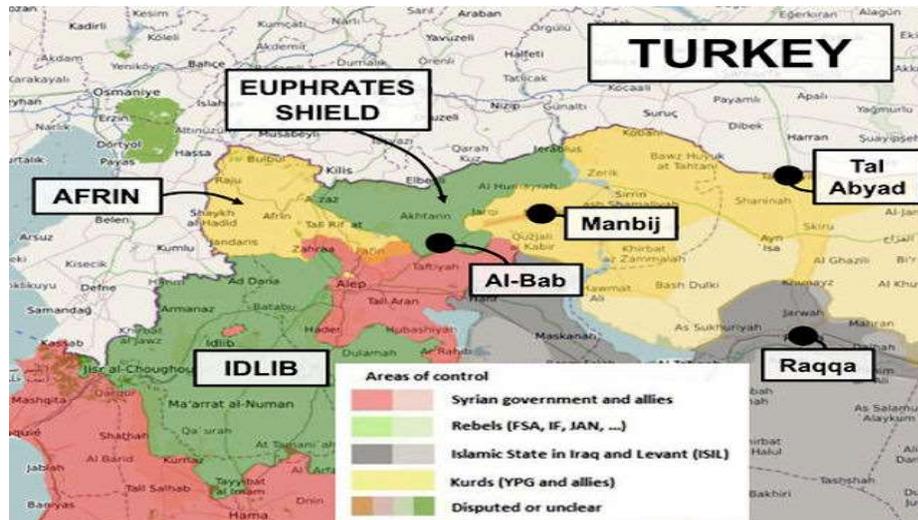
Menurut (Luerdi & Alfajri, 2018, hal. 57) pertemuan di Astana turut mengubah kebijakan luar negeri Turki untuk berkolaborasi dengan Rusia yang dianggapnya lebih menjanjikan bagi kepentingan nasional Turki dan sebagai resolusi konflik di perang Suriah, walaupun hasil perundingan yang digelar secara bertahap tidak begitu signifikan. Lebih dalam, (Pelino, 2018) membuat asumsi bahwa kebijakan politik Turki memilih Rusia tak lebih sebagai strategi politik realistik (*Realpolitik*) atas desakan-desakan yang tak diindahkan oleh AS dan sekutu Barat untuk berhenti membantu pasukan Kurdi. Terutama setelah Erdogan

membuat pernyataan kritik terhadap NATO *“Di satu sisi kita akan bersama di NATO tetapi di sisi lain kamu akan bertindak bersama dengan organisasi teror ... Mereka yang disebut teman tidak melihat ada masalah berjalan bersama dengan organisasi teror yang ingin membagi Turki ... Semua dari langkah-langkah ini menentang NATO ... Dalam hal ini, perjanjian NATO harus direvisi ”.*

Salah satu yang dirundingkan dalam pertemuan di Astana adalah wacana demiliterisasi dan deeskalasi pertempuran yang tempatnya belum ditentukan. Dalam beberapa perundingan astana, Pihak Rusia memproposalkan Idlib untuk dibagi dan sebagai salah satu lokasi gejalan senjata, namun ditolak oleh Turki karena posisinya yang strategis untuk pertahanan terakhir para pemberontak, berdekatan dengan Aleppo di Utara, dan Turki berusaha menegosiasikan Afrin yang dikuasai oleh pasukan Kurdi sebagai tawaran baru.

Menurut analisis dari (Harmon Centre for Contemporary Studies, 2017, hal. 6), penawaran Afrin oleh Turki kepada Rusia dan pemerintah Suriah dan menyingkirkan Kurdi dari hadapan Rusia merupakan tujuan Turki paska operasi perisai Eufrat. Kedua tujuan itu bisa dijalankan melalui sebuah operasi lanjutan Turki di Suriah dan Deputy Kemenlu Rusia, Mikhail Bogdanov berjanji kepada Turki untuk merundingkan masalah Afrin di pertemuan Astana. Rusia pun sempat memberikan proposal penyerahan Afrin kepada pemerintahan Suriah dan memperingatkan serangan Turki selanjutnya ke Afrin. Pemerintah administrasi Kurdi setempat secara tegas menolak permintaan Rusia tersebut dan meminta pejabat AS untuk menahan serangan Turki (U.S. News & World Report, 2018).

Pemilihan Afrin disebabkan oleh faktor Geopolitik dan Demografis. Secara Geopolitik, Afrin merupakan kanton Federasi Suriah Utara yang terpisah kanton Suriah Utara lainnya seperti kanton Kobane dan Jazira. Usaha penyatuan pasukan Kurdi untuk menyatukan Afrin juga telah digagalkan lewat operasi perisai eufrat sebelumnya. Kanton memiliki nilai posisi yang strategis karena berada di lingkungan wilayah kekuasaan pemberontak (Aleppo di selatan dan Azas di Timur dan Turki (di barat dan utara).



(Gambar 4.2.2.1, Peta Wilayah Utara Suriah Setelah Operasi Perisai Eufrat. Hasil operasi sebelumnya membuat wilayah Afrin (Suriah Utara) menjadi terpisah dengan wilayah daratan Suriah Utara yang lain. Gambar diambil dari

<https://www.globalsecurity.org/military/world/war/syria-olive-branch.htm> )

Afrin merupakan persembunyian PKK kelam di masa insurjensi era 1990an. Sedangkan secara demografis, Afrin merupakan wilayah Federasi Suriah Utara sejak pecahnya konflik Suriah di Tahun 2012 hingga melewati Revolusi Rojava pada tahun 2014 dan tidak pernah tersentuh oleh kubu manapun. Pusat kanton Afrin atau kota Afrin itu sendiri merupakan kota multietnis yang terdiri dari 500.000 penduduk dan hanya sekitar 45% berasal dari suku Kurdi. Menurut sebuah data (*Ibid*, Harmoon Centre for Contemporary Studies, 2017, hal. 3) ada banyak persentase dari seluruh masyarakat Kurdi di Afrin yang tidak senang dengan keberadaan sayap militer PYD seperti SDF ataupun YPG dan kebanyakan dari masyarakat kurdi Afrin memiliki kerabat dan keluarga di Turki yang telah bermukim sejak tahun 80-90an.

Tidak hanya dari masyarakat kurdi saja. Penyerangan Afrin juga menyita perhatian dari suku lain salah satunya adalah Turkmen Suriah yang banyak membelot dan mendukung pemberontak Suriah bentukan Turki, seperti keterlibatan organisasi sayap kanan Ülkü Ocakları (SOHR, 2018) dan seorang pejabat militer SDF, Talal Silo yang sebelumnya adalah juru bicara dewan militer Manbij (US-backed SDF spox Talal Sillo defects from PKK-aligned group, crosses into Turkey, 2017) walaupun pada awalnya PYD yakin Talal diculik oleh badan intelijen Turki (MIT) untuk dimintai keterangan terkait strategi penyerangan Afrin (SDF spokesman kidnapped by Turkish intelligence, says group, 2017).

Pada saat Turki melakukan konvoi militer ke arah Idlib untuk menyerang kantong terakhir ISIS, Erdogan mengatakan akan melakukan penyerangan ke

Afrin setelah operasi Idlib berakhir (Hurriyet Daily News, 2017). Menurut laporan berita di Turki dalam (Tastekin, 2017), angkatan darat Turki telah mengkaji persiapan penyerangan di Afrin dan tinggal menunggu masa eksekusi. Koordinasi juga dilakukan dari kubu pemberontak, Jawad Abu Hatab, perdana menteri pemerintahan sementara Suriah (pemberontak) bertemu dengan perwakilan kementerian Turki, untuk mengajukan berkas berkas pembebasan Suriah utara pada bulan Oktober di kota Kilis (Jawad Abu Hatab meets with Turkish officials and discusses these files, 2017).

Pemerintah Turki melalui Menteri Pertahanan, Nurettin Canikli secara resmi mengumumkan dimulainya operasi penyerangan Afrin pada tanggal 19 Januari 2018 lewat serangan lintas perbatasan (Ozkan, 2018). Tidak ada angka pasti berapa pasukan Turki yang dikerahkan, sedangkan pemberontak mengirimkan 25.000 militanya dalam operasi Turki di Afrin (Al-Khalidi, 2018). Pasukan kurdi melakukan serangan ke Azas, kota yang menjadi markas pemberontak serta beberapa kota yang dihuni warga sipil di Turki sebagai respon masuknya pasukan Turki dari utara. Namun beberapa titik strategis mampu dikuasai setelah dua hari masuknya pasukan Turki, salah satunya adalah gunung Barsaya dan kota Bubul yang letaknya tidak jauh dari Azas dan menjadi tempat strategis artileri YPG di akhir Januari (TRT World, 2018).

Pertempuran sengit juga terdapat ditimur Afrin, atau lokasinya berada di selatan Provinsi Hatay, Turki. Dalam sehari pasukan YPG berhasil membunuh 11 pasukan dan menghancurkan sebuah helikopter Turki di tanggal 10 Februari. Selama kurang dalam satu bulan, pasukan YPG di klaim telah berhasil membunuh

sekitar 1.000 pasukan Turki dan pasukan pembebasan selama operasi, dan melepaskan tawanan ISIS (*Ibid*).

Kota Rajo yang berada dibarat merupakan kota padat penduduk pertama di sekitar Afrin yang berhasil dikuasai pada tanggal 20 Februari (*Ibid*). Tanggal 18 Maret atau kurang dari dua bulan, kota Afrin berhasil di kuasai secara menyeluruh oleh pasukan Turki dan pasukan pemberontak namun masih menyisahkan sedikit enklave wilayah PYD, Tall Rifa'at yang berada di utara Aleppo karena susahnya medan dan pertahanan yang kuat SDF bahkan sejak operasi perisai eufrat berlangsung.

Korban yang berjatuhan dari fase penguasaan awal, YPG mengklaim telah membunuh sekitar 2.422 pasukan musuh dan ada 544 pasukan kurdi yang terbunuh (YPG Press Releases, 2019). Dari pihak non kombatan ada 244 warga sipil yang tewas selama dua bulan penyerangan, 51 diantaranya adalah anak anak dan 650 warga yang terluka. Sedangkan menurut PBB dalam (Shiite News Network, 2018) ada 163.000 warga Afrin yang mengungsi.

Dalam fase penguasaan Afrin ini, militan pro-Assad sempat masuk ke Afrin untuk terlibat memerangi Turki walau berhasil dilumpuhkan lewat serangan artileri (*opcit*) dan menewaskan sekita 55 militan. Rezim Suriah memiliki posisi di tengah dan tidak mendukung kedua pihak saat operasi di gelar berlangsung. Presiden Bashar al-Assad mengkritik keras tindakan Turki masuk ke wilayah Suriah sebagai tindak terorisme yang sejak lama telah mendukung teroris (Agence France-Presse, 2018).

Selama melakukan operasi, Turki mencoba meyakinkan Suriah. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu meyakinkan rezim Suriah untuk tidak perlu mengkhawatirkan kehadiran militer Turki di Afrin, bahkan melakukan ajakan untuk berperang bersama (Telegraph, 2018). Begitupun Rusia, Wakil Perdana Menteri Turki, Bakir Bolzag juga menjamin Rusia jika pertempuran ini tidak ditunjukkan untuk melawan pasukan Rusia yang berada di Afrin (Yildizalp & Sehin, 2018).

Selama ini, Rusia dan AS menghadapi situasi genting yang membuat kedua negara bersepakat untuk menjaga pertahanan YPG dari serangan Turki, dengan menempatkan sekitar 3.000 pasukan disekitar perbatasan walau tidak berhasil menahan masuknya Turki. Namun berbeda dengan negara Eropa seperti Perancis yang sejak pertempuran Kobani telah menyokong penuh pembentukan desentralisasi Suriah yang digagas oleh YPG, Emanuel Macron dan Francois Hollande menentang keras tindakan Turki dan menganggap serangan Turki di Afrin justru akan melemahkan koalisi yang berperang melawan ISIS. (Reuters, 2018)